

NEGERI DAN PELABUHAN LADA DI ACEH BARAT DAYA (1750an - 1870an)

- HASBULLAH -



**HANGATNYA REMPAH DI NEGERI RANTAU:
NEGERI DAN PELABUHAN LADA DI ACEH
BARAT DAYA (1750an-1870an)**

HASBULLAH

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI ACEH
2022**

HANGATNYA REMPAH DI NEGERI RANTAI: NEGERI DAN PELABUHAN LADA DI ACEH BARAT DAYA (1750an - 1870an)

Pengarah Program

Drs. Nurmatias
(Plt. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh)

Penulis

Hasbullah, S.S.

Editor

Drs. Mawardi Nurdin, M.Hum., M.A.

Desain Sampul

M. Faiz Basyamfar

Tata Letak

Agung Suryo

vii + 34 hlm: 14,8 x 21 cm
Cetakan pertama, Oktober 2022

Penerbit:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17, Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Aceh, 23123
<http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh>

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN:

SEKAPUR SIRIH
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI ACEH

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat-Nya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh kembali menerbitkan beberapa buah *booklet* yang bertema sejarah dan budaya. Salah satunya berjudul “Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya (1750an-1870an)”. Kami menyambut baik hal ini, dan merekomendasikan untuk dibaca oleh khalayak sebagai sumber informasi yang enak dibaca dan perlu.

Sebagaimana diketahui, banyak tinggalan kisah masa lalu sebagai memori kolektif dan karya budaya di jalur rempah yang kini berada di ambang kepunahan karena keterbatasan pengetahuan tentang sejarah dan kepedulian yang semakin berkurang, karena perubahan aktivitas, kepemilikan tanah, maupun karena disengaja maupun tidak. Begitu juga berbagai tinggalan kisah dan objek yang diduga cagar budaya di Pantai Barat Selatan Aceh, terutama di Aceh Barat Daya banyak yang belum didokumentasikan.

Booklet ini hadir untuk membahas Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya agar tersebar luas pada khalayak. Tujuannya agar orang menyadari tinggalan masa lalu terkait dengan keberadaan dan aktivitas budaya manusia di masa kini, terutama untuk mengetahui jati diri mereka yang hidup dan berada di titik-titik jalur rempah Indonesia maupun di nusantara.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada penulis. Kiranya ini bukan tulisan terakhir. Akan tetapi, langkah awal mengulas informasi sejarah sebagai alternatif informasi bagi stakeholder, khususnya pecinta sejarah dan budaya. Kendati demikian, kritik dan saran kami terima sebagai masukan agar penerbitan selanjutnya menjadi lebih optimal. Demikian, semoga booklet ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, Oktober 2022
Plt. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Provinsi Aceh

Drs. Nurmatias
NIP. 196912261997031001

PENGANTAR EDITOR

Menempati posisi strategis yang berada di pintu gerbang Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai wilayah pertama yang ditemui atau disinggahi oleh para pelaut yang datang dari arah Barat yang ingin memasuki wilayah Nusantara. Dengan posisi ini pula, Aceh juga menjadi daerah terakhir yang dilalui para pelaut yang akan meninggalkan wilayah Nusantara dari arah timur. Didukung pula dengan adanya fenomena angin muson telah menyebabkan terjadinya pertumbuhan sejumlah bandar dagang di Aceh. Dengan pola angin yang berhembus secara bergantian setiap tahun baik dari arah barat (muson barat) maupun dari arah timur (muson timur) sangat menguntungkan, karena Aceh menjadi tempat persinggahan ideal bagi para pelaut dalam penantian perubahan angin untuk menuju ke daerah tujuan mereka. Proses perhentian dan penantian itu pulalah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya sejumlah bandar di Aceh.

Munculnya bandar-bandar tersebut sangat menguntungkan, karena selain komoditas lokal dapat mencapai pasar dunia, Aceh juga mengenal komoditas baru yang dapat dibudidayakan di Aceh seperti lada atau merica. Lada yang merupakan komoditas utama perdagangan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa kejayaannya abad ke-17 merupakan komoditas baru, yang diperkirakan berasal dari India, kemudian dibudidayakan dengan cukup berhasil di Aceh. Tingginya permintaan lada Aceh di pasaran dunia yang berpengaruh terhadap melambungannya harga telah menyebabkan terjadinya ekstensifikasi penanaman lada, baik dilakukan atas instruksi penguasa maupun dilakukan atas inisiatif sendiri dari masyarakat. Sejak akhir abad ke-17, terjadilah migrasi besar-besaran masyarakat dari Aceh Besar dan Pidie ke Pantai Barat Aceh untuk mencoba peruntungan membuka perkebunan lada (*buka seuneubok*).

Dengan kesuburan tanah yang cukup baik, usaha ini cukup berhasil sehingga beberapa wilayah di Pantai barat Aceh menjadi sentra penghasil dan pelabuhan lada, seperti Susoh dan Kuala Batee di Aceh barat Daya. Pada saat-saat keemasannya, lada yang dihasilkan dari kedua wilayah ini dapat mencapai pasar dunia melalui perdagangan langsung dengan kapal-kapal asing yang singgah secara rutin seperti kapal-kapal dagang Amerika dan Inggris. Hubungan dagang luar negeri ini dapat terjadi saat-saat kontrol dari pemerintah pusat Kesultana Aceh Darussalam melemah sejak akhir abad ke-17. Proses perdagangan ini selain membawa kemakmuran

bagi masyarakat juga membawa akibat hancurnya Pelabuhan Kuala Batu (Kuala Batee) karena diserang oleh kapal perang Amerika akibat kesalahpahaman.

Dinamika perdagangan lada di Pantai Barat Aceh, terutama di Aceh Barat Daya sangat menarik untuk dikaji. Namun sayang, sampai saat ini tidak banyak literatur yang memadai yang telah ditulis tentang persoalan tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi salah satu alternatif bacaan yang penting tentang fenomena sejarah tersebut. Ditambah lagi dengan terjadinya perubahan paradigam generasi milineal saat ini ke hal-hal yang lebih *instant*, booklet ini benar-benar menjadi alternatif solusi yang sangat baik untuk mengisi kekosongan historiografi tentang Aceh Barat Daya. Selain disusun dengan ulasannya yang ringkas dan lugas, gaya penulisan booklet ini yang cenderung populer sehingga sangat sesuai dengan selera generasi milenial.

Banda Aceh, 07 Agustus 2022
Editor,

Drs. Mawardi Umar, M.Hum., M.A.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya proses penulisan *booklet* berjalan lancar sejak pengumpulan data hingga penerbitan. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan dan kerja sama.

Penulisan *booklet* ini berawal dari kajian singkat terkait jalur rempah khususnya negeri dan pelabuhan lada di Pantai Barat Aceh yang skupnya dipersempit di Aceh Barat Daya (1750an-1870an). Pengumpulan data; sumber kepustakaan maupun sumber lisan, ditemukan beberapa kisah terkait negeri dan pelabuhan lada di Pantai Barat Selatan Aceh.

Banyak juga kisah yang tercatat dalam memori kolektif masyarakat maupun yang disebut dalam hikayat dan sumber sejarah asing yang sudah diterjemahkan. Akan tetapi, sayangnya pelabuhan lada ini hampir semua sudah tidak berfungsi dan sebagian beralih fungsi menjadi sandaran perahu nelayan.

Bahkan, ada pelabuhan lama yang berubah menjadi lahan sawit sebagai komoditas pengganti lada yang telah mewarnai kisah kehidupan kekinian. Lada sebagai komoditas di masa lalu sudah lama ditinggalkan, karena sudah ada tanaman pengganti (sawit) yang telah mengubah laju sejarah.

Terkait kemunduran negeri dan pelabuhan lada yang dulunya pernah menjadi arus utama sejarah pergerakan manusia di Aceh setelah beralih ke era daratan. Akan tetapi, kini terhampar dalam peradaban ekonomi baru, yaitu sawit yang sudah tidak banyak menggunakan jalur laut lagi.

Kisah masa lalu itu diulas secara singkat dalam *booklet* ini, sebagai pengenalan bagi para pembaca sehingga nantinya bisa membuka cakrawala untuk pengungkapan yang jauh lebih luas dalam penelitian selanjutnya.

Sebagai sebuah karya ilmiah, *booklet* ini memerlukan kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai masukan agar dapat menjadi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Banda Aceh, Oktober 2022
Penulis

Hasbullah, S.S.

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Secupak Lada	<i>iii</i>
Kata Pengantar Editor	<i>iv</i>
Kata Pengantar Penulis	<i>vi</i>
Daftar Isi	<i>vii</i>
Pendahuluan	<i>1</i>
Pantai Barat Selatan Aceh Abad XVIII-XIX	<i>9</i>
Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya	<i>14</i>
Penutup	<i>30</i>
Daftar Pustaka	<i>32</i>

PENDAHULUAN

Ketika bangsa Asia telah menggapai kejayaan pada abad ke-14-15, sebaliknya bangsa Eropa masih dalam ‘abad kegelapan’. Ketika itu, Turki Usmani (Ottoman) menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai bangsa Eropa, khususnya Romawi Timur atau Byzantium. Penguasaan wilayah-wilayah tersebut telah menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat. Akibatnya, komoditi perdagangan dari Timur menjadi sangat langka dan mahal di Barat (Eropa) sehingga para pedagang di sana mencari jalan sendiri ke negeri-negeri penghasil rempah.¹

Pada saat itu, komoditas lada Sumatera sangat digemari di Eropa bahkan hingga ke Tiongkok. Pada akhir abad 18 (1798-1799) sampai awal abad ke-19 (1832), selain bangsa Eropa, Amerika pun sudah menjadi ‘pemain baru’ dalam jaringan perdagangan lada di dunia. Meski harga lada saat itu masih separuh dari harga rempah lainnya, namun lada sudah menjadi komoditas ekspor yang sangat penting di nusantara, bahkan Asia Tenggara.

Sebagai komoditas perdagangan, lada awalnya diperoleh di Kerala, Malabar, India bagian Barat Daya, sehingga daerah ini menjadi negeri yang saat itu dikenal oleh bangsa Arab dan bangsa Eropa sebagai “negeri lada”.² Mengenai kapan budidaya lada di Sumatera, ternyata sampai kini belum ada kejelasan data. Laporan Marco Polo (1292) dan Ibnu Batutah (1355) belum menyebutkan

¹Ricklef, M.C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm.198.

²Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm.9

adanya komoditas lada termasuk di Sriwijaya sebagai bahan perdagangan kerajaan tersebut. Sumber dari Tiongkok juga menyebutkan, “lada diperoleh dari Malabar. Komoditas lada yang dibeli oleh pedagang asing dari Jawa berasal dari Malabar”.³ Sumber-sumber tersebut juga tidak menunjukkan Sriwijaya sebagai wilayah produsen lada pada awalnya. Namun, itu bukan berarti pulau Sumatera tidak menghasilkan komoditas lada.

Pada akhir abad ke-13, Samudera Pasai dan Pedir (Pidie) sudah berkembang menjadi kota perdagangan dunia. Salah satu komoditas perdagangannya yang paling utama adalah lada.⁴ Peran pasai dalam perdagangan lada berlangsung sampai akhir abad ke-14. Sejak abad ke-15, posisi Pasai dalam perdagangan lada digantikan oleh Malaka, karena letak Malaka dari Timur Nusantara (Maluku dan Maluku Utara) sangat strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Samudera Pasai.

Posisi inilah yang membuat Portugis tertarik untuk menguasai Malaka hingga berhasil mendudukinya dalam petualangan Afonso d’Albuquerque pada 1511. Sebelum merebut Malaka, mereka menguasai Ormuz di Laut Merah dan Goa di India. Namun, hal ini membuat Malaka dihindari oleh pedagang muslim, karena politik *gospel* (penyebaran agama) yang diterapkan Portugis, sehingga Malaka semakin merosot dan tidak pernah meraih kejayaannya kembali.⁵

Pada abad ke-17, perdagangan di Malaka sudah dikuasai oleh tiga kekuatan besar, yaitu; (1) Aceh, (2) Johor, dan (3) Portugis. Johor bekerja sama dengan Belanda, dan Malaka dikuasai oleh Portugis. Hal ini membuat Aceh menyerang Johor sehingga keluarga Sultan Johor ditawan dan dibawa ke Aceh. Aceh juga menghancurkan benteng VOC di Johor pada 1613. Johor berkali-kali diserang oleh Aceh. Akan tetapi, Johor dan Portugis tidak pernah menyerang kembali ke Aceh. Serangan militer Aceh, baru berhenti setelah mengalami kekalahan telak di pelabuhan Malaka.⁶

³Reid, dalam Mohammad Iskandar, *Nusantara Dalam Kurun Niaga Sebelum Abad ke-19*, dalam *Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol.7 Nomor 2, Oktober 2005), hlm.180.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*, lihat Meilink Rulofsz, M.A.P, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. 1962, hlm.172.

⁶Mohammad Iskandar, *Nusantara Dalam Era Niaga Sebelum Abad ke-19*, dalam *Naskah, Tradisi Lisan dan Sejarah*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pengetahuan UI, hlm.183-184.

Setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, Pantai Barat Sumatera beralih menjadi jalur perdagangan penting dan ramai pada abad ke-16. Jalur perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh hegemoni Kesultanan Aceh yang sangat kuat secara *de facto*. Aceh menguasai perdagangan lada di pantai Barat Sumatera, juga menguasai emas di Salida.⁷

Pada abad ke-18, hegemoni Kesultanan Aceh mulai memudar, terutama masa Sultanah Tajul Alam Naqiatuddin Syah. Saat itu, terjadi persekutuan antara Belanda dengan Melayu (Pagaruyung) yang berusaha menghapus pengaruh Kesultanan Aceh di Padang sejak 1663. Akibatnya, Kesultanan Aceh banyak mengalami kerugian karena negeri-negeri vasal yang sebelumnya sebagai penghasil devisa Aceh melalui perwakilannya di Pantai Barat Sumatera sudah mengadakan perjanjian perdagangan sendiri-sendiri dengan para pedagang asing dan dilakukan secara ilegal.⁸

Ketika itu, VOC mengambil kesempatan untuk menguasai Pantai Barat Sumatera. Akan tetapi, posisinya tidak kondusif karena Kesultanan Aceh, ternyata pengaruhnya masih sangat kuat di sana. Oleh karena itu, Kesultanan Aceh menyerang posisi VOC di Padang untuk mempertahankan status Aceh di Pantai Barat Sumatera hingga 1670. Akan tetapi, karena situasi saat itu tidak menguntungkan, karena pada saat bersamaan, Aceh berperang di dua fron, yaitu di Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera. Bahkan, pada saat itu juga Aceh berusaha untuk mempertahankan eksistensinya hingga ke negeri seberang, di Malaka. Kesempatan ini dipergunakan VOC untuk menanamkan pengaruhnya di Pantai Barat Sumatera hingga akhirnya, mereka menguasai pertambangan emas di Salida yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh.⁹

Pada akhir abad ke-18 (1799), VOC mengalami keruntuhan akibat korupsi petinggiya yang merajalela dan wilayah kekuasaannya diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pada saat yang bersamaan, Aceh juga mengalami hal yang sama karena konflik internal dan perang saudara sehingga membuka kesempatan bagi Belanda untuk terus menanamkan pengaruhnya dan mulai menguasai negeri-negeri vasal yang sebelumnya dikuasai

⁷H.Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Harian Waspada), hlm.337.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Kesultanan Aceh, baik di Pantai Barat maupun Pantai Timur Sumatera.

Sampai dengan pertengahan abad ke-18 (1750an) Belanda masih belum sepenuhnya menguasai Pantai Barat Selatan Aceh sehingga negeri-negeri pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia (Indonesia) berkembang dalam aktivitas perdagangan dunia, baik secara legal maupun ilegal. Akibatnya, muncul negeri-negeri dengan pelabuhan baru walaupun Kesultanan Aceh masih mengklaim wilayah pesisir itu sebagai wilayah kekuasaannya.

Adapun beberapa negeri dan pelabuhan yang muncul pada saat itu di Aceh Barat Daya, di antaranya adalah negeri dan pelabuhan Susoh yang diperkirakan eksis sejak pertengahan abad ke-18. Pelabuhan dan negeri ini bertahan hingga awal abad ke-19. Negeri dan pelabuhan Susoh merupakan salah satu pusat perdagangan yang ramai di Pantai Barat Selatan Aceh saat itu.¹⁰ Selain itu, di sekitarnya juga muncul dan dikenal beberapa negeri dengan pelabuhan lainnya, yaitu negeri Kuala Batu dan negeri Teluk Pauh (Lhok Pawoh dan Lhok Pawoh Utara) yang awal pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh negeri Susoh.

Penelusuran akar permasalahan negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya (1750an-1870an) penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa dengan penggalian sumber sejarah. Pengkajian ini menelusur dinamika perkembangan negeri dan pelabuhan lada yang tercatat dalam memori kolektif masyarakat di Pantai Barat Selatan Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Faktor-faktor permasalahan direkonstruksi untuk menjawab pertanyaan permasalahan. Untuk itu, dirumuskan pertanyaan tentang pertumbuhan negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya untuk menjelaskan negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya (1750an-1840) dengan dinamika perkembangannya.

Deskripsi ini dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang berguna sebagai inspirasi pada generasi muda di masa kini, dan masa mendatang sehingga senantiasa cepat, tepat, cermat serta bijak bertindak dengan mewarisi dan menggali nilai-nilai positif masa lalu sebagai memori kolektif bangsa Indonesia yang sejarahnya berada di jalur rempah

¹⁰Zakaria Ahmad, *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah menuju Daerah Otonom*, (Blangpidie: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2007), hlm.3

skala dunia sebagai komoditas yang telah menggerakkan kehidupan ekonomi dan politik, sosial dan budayanya.

Kajian sejarah lokal berkaitan dengan negeri dan pelabuhan di Aceh Barat Daya ini secara praktis bermanfaat sebagai refleksi belajar dari pengalaman masa lalu sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang lebih baik di masa kini dan masa mendatang, khususnya sebagai edukasi pada generasi muda penerus estafet pembangunan bangsa.

Manfaat kajiannya diperlukan menambah wawasan dan pengetahuan sejarah peradaban bangsa terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi sehingga menjadi spirit bagi pembangunan bangsa di masa kini dan mendatang yang sesuai jati diri bangsanya.

Ruang lingkup kajian negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya (1750an-1870an) pernah disebut dalam beberapa referensi lokal maupun asing. Akan tetapi, untuk menggali jejak atau tinggalan negeri dan pelabuhan lada dilakukan pencarian sumber sejarah, analisa sumber sejarah, dan intepretasi sumber sejarah sehingga diperoleh akar permasalahan (*sense of belonging*) atau objektivitas dalam kajian ilmu sejarah.

Munculnya suatu negeri dan pelabuhan tidaklah serta-merta berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, semuanya terkait dengan kronologis peristiwa yang kompleks di masa lalu. Untuk mengurainya, diperlukan suatu kajian komprehensif terkait adanya fakta dan proses serta dinamika perkembangan dari peristiwa yang melingkupinya yang diinterpretasi ke dalam penulisan sejarah atau historiografi.

Kajian negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya dibatasi temporal 1750an-1870an, dengan lingkup spasial 'Aceh Barat Daya' sebagai kawasan Pantai Barat Aceh pada masa kolonial, dengan bentangan geografis mulai dari Seumayam (Surien) hingga Lhok Pawoh di ujung Manggeng sebagai pokok dari pembahasan. Sedangkan, ruang lingkup materi kajian membahas pertumbuhan dan dinamika negeri dan pelabuhan di Aceh Barat Daya pada kurun waktu tersebut.

Batasan awal kajian pada 1850an, di mana kawasan Aceh Barat Daya saat itu menjadi tujuan migrasi dari arah Selatan maupun Timur ke Pantai Barat Sumatera setelah Pantai Barat Sumatera (Padang) dikuasai oleh VOC. Pantai Timur Aceh setelah Malaka dikuasai oleh Portugis dan terjadinya konflik internal di dalam Kesultanan Aceh telah membuka kesempatan orang atau

enterpreneurship muncul sebagai pemilik modal untuk pengembangan *seuneubok* lada ke Pantai Barat Selatan Aceh.

Batasan terakhir 1870an adalah mangkatnya Sultan Ibrahim Alaidin Mansyur Syah yang pada akhir kekuasaannya pernah menertibkan perdagangan lada di beberapa negeri dan pelabuhan di Pantai Barat Selatan Aceh sampai ke Trumon (Aceh Selatan dan Aceh Singkil). Di sisi lain, masa itu, beberapa negeri yang sebelumnya sebagai negeri-negeri yang mengakui kekuasaan Aceh sudah direbut oleh Belanda. Salah satunya Barus yang menjadi wilayah negeri Singkil direbut yang Belanda pada 1838. Dua tahun kemudian negeri Singkil juga lepas dari Aceh, yaitu pada 1840.

Sebelumnya negeri Trumon juga telah ingkar pada Kesultanan Aceh dan mereka telah mengikat perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Belanda sejak 1830. Bahkan, mereka menganggap, wilayah Trumon sebagai wilayah merdeka dan tidak terikat lagi dengan 'Perjanjian London' yang masih mengakui kekuasaan Aceh pada 1824; intinya Inggris masih mengakui dan menghormati kedaulatan Kesultanan Aceh atas Sumatera. Bahkan, pada 1832 negeri Trumon menyurati serta mengundang pembeli lada dari Amerika, yaitu Kapten James D. Gillis untuk membeli ladanya.

Pada saat itu, keterlibatan berbagai pihak atau bangsa lain dalam perdagangan lada di Pantai Barat Sumatera yang dibatasi atau terganggu dengan adanya blokade laut Belanda pada Aceh sehingga melahirkan stigma 'bajak laut'. Mereka 'menguasai' Pantai Barat Sumatera hingga ke Pantai Barat Selatan Aceh yang dianggap sebagai wilayah yang 'tak bertuan' dan 'tak berhukum'. Kawasan ini seperti 'kawasan bebas' sehingga 'dikuasai oleh bajak laut atau perompak'.

Kapal-kapal dagang dari Eropa dan Amerika pada saat itu bebas lalu-lalang di Pantai Barat Selatan Aceh. Beberapa negeri muncul pelabuhan-pelabuhan, seperti Meulaboh (Aceh Barat), Tapaktuan, Trumon (Aceh Selatan), Singkil (Aceh Singkil), Rigaih (Aceh Jaya), Meukek, Labuhan Haji (Aceh Selatan), Kuala Batu, Pulau Kayu, Susoh, Lhok Pawoh (Aceh Barat Daya) sebelum 1799.¹¹

Lingkup spasial kajian adalah wilayah yang dulu diduga pernah menjadi negeri dan pelabuhan lada di Kabupaten Aceh Barat

¹¹Osgood and Batchelder, *Historical Sketch of Salem*, dan George G. Putnam, *Salem Vessel and Their Voyages*, The Essex Institute, 1822 dalam H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Cet. IV, Medan: Waspada, TT. Hlm. 419-420.

Daya berdasarkan tinggalan, baik berupa struktur bangunan pertahanan, alat persenjataan, maupun sejarah lisan serta tradisi lisan juga didukung toponimi nama perkampungan yang ada hingga saat ini. Terkait penggunaan istilah “Aceh Barat Daya” sebenarnya hanya meliputi wilayah yang terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat ini, yaitu; Kecamatan Kuala Batee (pemekaran Kuala Batee Kecamatan Babahrot), Blangpidie (pemekaran Blangpidie Kecamatan Jeumpa), Susoh, Tangan-Tangan, dan Manggeng (pemekaran Manggeng, Kecamatan Lembah Sabil).

Kajian negeri dan pelabuhan lada di Aceh Barat Daya (1750an-1870an) merupakan aspek kajian sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah dari tempat atau lokalitas yang terdapat di dalam pembatasan spasial tentang kisah kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada di dalam lingkup “geografis” yang terbatas.¹² Sejarah lokal menjelaskan peranan masyarakat dalam periodisasi sejarah. Penulisan sejarah lokal dimaksudkan sebagai pembinaan loyalitas daerah dalam lingkup nasional untuk kesinambungan sejarah bangsa.

Metode pengkajian sejarah lokal menggunakan metode sejarah yang tidak terlepas dari definisi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan dalam historiografi sebagai karya tulis sejarah. Metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisa secara kritis jejak rekam masa lalu¹³ dilakukan dengan tahapan; pengumpulan sumber, verifikasi sumber (kritik internal untuk membuktikan kredibilitas sumber, dan kritik eksternal), interpretasi (analisis dan sintesis) serta historiografi (penulisan sejarah). Proses pengumpulan sumber dilakukan di perpustakaan; sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diperkuat dengan tinggalan sejarah yang ada di lokasi penelitian; seperti jejak benteng, persenjataan, makam, yang ditemui di lokasi pengkajian.

Penelusuran sumber perpustakaan dilakukan di Perpustakaan BPNB Aceh dengan beberapa buku terkait, di antaranya Aceh Sepanjang Abad yang membahas sejarah Aceh, dll. Selain itu, dengan mewawancarai tokoh lokal, serta mengaitkan

¹²Finberg dan Skipp, dalam Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Cet.5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005., hlm.15

¹³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Nutosusanto, (Jakarta: UI Press, 1969), hlm.32

beberapa toponimi nama negeri dan kampung yang terkait dengan komoditas rempah, negeri dan pelabuhan di Aceh Barat Daya.

Hasil pengkajian mendeskripsikan latar belakang historis yang menunjukkan kontinuitas dan dinamika yang saling berkaitan. Ilmu sejarah menjelaskan dan memusatkan pada kontinuitas persoalan yang terkait di masa lampau yang terus berkembang sampai sekarang hingga mendatang, yang secara kontekstual menjelaskan untuk memahami peristiwa seperti yang telah terjadi.¹⁴

¹⁴Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm.6.

PANTAI BARAT SELATAN ACEH ABAD XVIII-XIX

Kesultanan Aceh abad ke-18 hingga awal abad ke-19, belum banyak diteliti oleh sejarawan nasional di Aceh. Pada periode ini Belanda mulai mengincar negeri-negeri atau vasal-vasal yang ada di bawah naungan Kesultanan Aceh untuk segera dimasukkan ke '*Pax Nerlandica*'. Selain itu, pada periode ini sering terjadi "pemberontakan" di level bawah antarwilayah pecahan kesultanan, setelah hegemoni Aceh menurun. Pada saat bersamaan, Belanda berhasil menyusup ke dalam konflik-konflik internal Aceh, dengan tujuan mencapai target kolonialisasi.¹⁵

Pada abad ke-18, monopoli sultan Aceh atas negeri vasal mulai berkurang, terutama kekuasaan politik dan ekonomi. Kemunduran Kesultanan Aceh dimulai saat berakhirnya kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Setelah serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk mempertahankan hegemoni Aceh pada vasal-vasal yang sebelumnya dikuasai ternyata menguras kejayaan Kesultanan Aceh.

Biaya operasional untuk perang sangat besar terkuras dari bendahara Kesultanan Aceh untuk 19.000 prajurit ketika menyerang Portugis di Malaka pada 1629. Biaya yang besar lainnya juga dikeluarkan untuk melengkapi segala peralatan perang; seperti pembuatan kapal, perbekalan prajurit, dan melengkapi persenjataan strategis. Selain itu, serangan ini mengakibatkan berhentinya

¹⁵Jean Gelman Taylor, dalam Henk Schulte Nordholt, *et.all* (ed.) Aceh: Narasi Foto, 1873-1930', *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: KITLV, 2008), hlm.336

sumber-sumber produksi dari berbagai kegiatan perekonomian dan pertanian di wilayah Kesultanan Aceh sendiri.¹⁶

Pada periode itu, terjadi kebakaran besar yang melanda 'dalam' Kesultanan Aceh yang menghancurkan perbendaharaan Kesultanan Aceh yang terjadi pada masa pemerintahan Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam (1675-1678). Hal itu juga menjadi salah satu faktor berkurangnya kekayaan dan menyusutnya kekuasaan Kesultanan Aceh.

Namun, faktor utama kemunduran Kesultanan Aceh diduga sistem pemerintahan pada masa sultanah yang berlangsung selama lebih setengah abad sejak 1641.¹⁷

Pada saat ini, sultanah tidak lagi diperbolehkan keluar dari istana, sehingga diciptakan suatu kelas jabatan baru, yaitu *panglima sagoe* atau *keutua uleebalang*, terutama di negeri-negeri yang menjadi sentral penghasil padi (*seuneubok pade*) dan penghasil lada (*seuneubok lada*). Pengangkatan pemegang kekuasaan lokal ketua federasi *panglima sago* dan *uleebalang*, sebagai pemegang posisi strategis yang banyak menghasilkan kekayaan kesultanan sehingga menyebabkan terjadinya nepotisme di Kesultanan Aceh.¹⁸

Budaya politik di Kesultanan Aceh yang melarang penguasa perempuan mengurus hubungan diplomasi dengan pedagang rempah asing yang terkemuka sehingga harus diwakili oleh para *uleebalang* di negeri dan wilayahnya. Segala urusan dengan kesultanan saat itu harus dilakukan melalui perantara atau *sida-sida* istana.

Peranan dan posisi sultanah sejak saat itu mulai ditentang oleh sebagian ulama dan keluarga Kesultanan Aceh yang laki-laki. Selain itu, sultanah dihalang-halangi kekuasannya oleh para *uleebalang* sehingga kekuasaan mereka semakin melemah dan sudah tidak memiliki kekuatan. Selain itu, hak-hak istimewa juga semakin dipersempit dan diperkecil.

Setiap kedatangan utusan laki-laki dari *Dalam* Kesultanan Aceh bisa merebut kendali atas perdagangan lada yang dihasilkan oleh suatu wilayah vasal. Mereka menjadi para penguasa baru yang bebas bersyarat di wilayah-wilayah Kesultanan Aceh tersebut. Para *uleebalang* "mengorupsi" sebagian penghasilan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Husein Djyaningrat, dalam *Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

sultanah Aceh dari pajak ekspor dengan menyelundupkan lada keluar dari pelabuhan yang dikendalikan.

Pada masa ini, kedudukan *uleebalang* sangat berpengaruh di dalam menentukan siapa yang akan menjadi raja. Merekalah yang menentukan dari sekian calon raja yang berasal dari keturunan raja yang berhak menempati kedudukan sebagai sultan Aceh. Ketika sultan berhasil merebut kembali monopoli Kesultanan, para *uleebalang* berusaha menurunkan kembali posisinya. Mereka mengangkat raja laki-laki lain yang dinilai lebih lemah dan mudah dipengaruhi sebagai pengganti.¹⁹

Akibat ketidakpastian sistem politik di pusat Kesultanan Aceh itu, maka pada masa ini banyak terjadi migrasi orang-orang di wilayah Aceh Besar dan Pidie ke daerah-daerah lain, seperti ke Pantai Barat Aceh. Negeri-negeri itu merupakan kawasan “tak bertuan” dan “masih berhutan belantara”, terutama ke daerah-daerah yang dianggap cocok untuk membuka lahan pertanian lada dan padi. Di akhir abad 18, lada sudah muncul menjadi salah satu komoditi perdagangan dunia.

Pada abad ke-19, negeri-negeri di Kesultanan Aceh muncul sebagai pengekpor lada yang sangat besar. Hampir separuh kebutuhan lada dunia pada masa ini dipasok dari wilayah Kesultanan Aceh. Akan tetapi, devisa (keuntungan) dari perdagangan lada tidak dapat menutupi perbendaharaan Kesultanan Aceh, serta biaya melawan penjajah Belanda (biaya sabil) dan terus-menerus dilakukan oleh orang Aceh kemudian hari.

Di sisi lain, bukan hanya Eropa, Amerika pun begitu revolusi usai, mereka langsung mengembangkan layar, sebagai tanda dimulainya penelusuran jalur perdagangan rempah menuju Hindia Timur. Disebutkan pertama kali Amerika sampai ke Batavia pada 1786, termasuk saat itu konsul Amerika yang berada di Kanton datang ke sana. Awalnya pemerintah Hindia Belanda memberi akses pada Amerika untuk berdagang di Hindia Belanda. Akan tetapi pada kunjungan mereka pada 1790, kapal Amerika sudah tidak diizinkan lagi berdagang di wilayah Batavia sehingga mereka mulai mencari wilayah dan negeri yang masih terbuka di Sumatera. Sejak 1803,

¹⁹Lee Kang Hing, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, dalam *Ibid*, hlm.3 36.

Amerika mendatangi pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat Selatan Aceh, salah satunya pelabuhan Kuala Batu.²⁰

Bersamaan dengan periodisasi itu, di negeri ini juga banyak didatangi oleh orang Aceh yang berasal dari Aceh Besar dan Pidie. Mereka bermaksud membuka perkebunan (*seuneubok*) lada dan padi yang ramai sejak pertengahan abad akhir ke-18 hingga abad ke-19. Komoditi lada pada abad ini menjadi tanaman ekspor terpenting di dunia.²¹

Di kawasan Pantai Barat Sumatera, pada awalnya koloni Minangkabau dan Aceh membangun negeri di muara sungai, seperti di Surien (Lama Tuha, Seumayam), Kuala Batu, Susoh, Suak, Teluk Pawoh (Lhok Pawoh Manggeng dan Lhok Pawoh Utara Tangan-Tangan). Lambat-laun pemukiman terbentuk menjadi suatu pemerintahan lokal yang mandiri tetapi berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Di antara mereka yang berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan berkat kegiatan perniagaan lada, seperti Teuku Jakfar di Susoh, pada pertengahan abad 18.

Pada permulaan abad ke-19 para pemimpin negeri dan pelabuhan di Pantai Barat Selatan tidak mau membayar upeti kepada Sultan Alaidin Jauhar Alam Syah (1795-1824). Akibatnya, sultan Aceh murka dan memutuskan memimpin sendiri pelayaran ke negeri-negeri yang membangkang membayar upeti dan pajak.²² Kontrol hegemoni Sultan Aceh ternyata tidak serta-merta menutup kesempatan raja-raja kecil di negeri vasal mutlak dikuasai oleh pusat Kesultanan Aceh di Bandar Aceh Darussalam.

Ada kalanya secara ilegal mereka tetap berhubungan dengan pedagang asing dalam perdagangan lada tanpa membayar pajak *wase* atau bea cukai pelabuhan untuk perwakilan Kesultanan Aceh yang ditempatkan di negeri Susoh misalnya. Para pedagang Inggris, Amerika, Perancis dan Belanda sangat leluasa memasuki dan melakukan hubungan perdagangan dengan negeri dan

²⁰Rahadian Rundjan, Ketika Amerika Menginvasi Aceh pada 1832 dalam *historia.id* tanggal 14 Juni 2015 dalam <https://historia.id/politik/articles/ketika-amerika-menginvasi-aceh-pada-1832-DAIQ7> diakses 12 Februari 2022.

²¹Kedatangan atau perpindahan penduduk atau orang Aceh ke Pantai Barat menimbulkan konflik dan peperangan mengenai perebutan wilayah dan pemukiman dengan orang *Aneuk Jamee* yang datang dari Sumatera Barat ke Pantai Barat pada awal abad ke-18, lihat *Hikajat Potjut Muhammad*, edisi G.W.J Drewes, Martinus Nijhoff, *The Hague*, 1979, hlm. 116.

²²R. Hoesein Djajadiningrat "Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervette Gegevens over de Geschiedenis van het Soetanaat van Atjeh", *BKI*, 1911, hlm. 263.

pelabuhan-pelabuhan lada hingga pada awal abad ke-19. Pada masa itu pelaut Inggris, John Anderson menyebutkan ada beberapa negeri dan pelabuhan yang pernah disinggahinya yang berada di Pantai Barat Selatan, yaitu *Tallapow* atau Teluk Pawoh alias Lhokpawoh (muara di perbatasan Manggeng-Tangan-Tangan), Susoh (muara Krueng Susoh), Kuala Batu (muara Krueng Babahrot), dan Surien (muara Krueng Seumayam).²³

Berdasarkan peta Veth pada 1875, pada saat itu kekuasaan Kesultanan Aceh sudah terpecah-pecah menjadi seratusan raja kecil di negeri-negerinya. Semua orang yang memiliki kekuatan dapat merebut kekuasaan. *Uleebalang* dan ulama saat itu memiliki pasukan dan koloninya masing-masing. Serbuan di antara raja-raja kecil ini sering terjadi dan telah menjadi pemandangan umum saat itu.²⁴

Uleebalang negeri-negeri penghasil lada itu mulai merasakan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan lada. Mereka membelanjakan hasil perdagangan lada itu untuk konsumsi barang-barang mewah, seperti pakaian sutera, emas perhiasan, budak, dan juga untuk membiayai pasukan pribadi dan melengkapi pasukannya dengan meriam-meriam. Hal ini mengakibatkan setiap koloni bebas membangun benteng-benteng pertahanan yang disebut *kuta*. *Kuta-kuta* di Pantai Barat Selatan Aceh, seperti di Kuala Batu dibuat dengan gundukan tanah seluas 25 m² yang dilengkapi dengan meriam-meriam dengan arah menghadap mulut muara atau ke laut lepas.

²³John Anderson, *Acheen and The Port on The North and East Coast of Sumatra*, hlm. 159.

²⁴Henk Schulte Nordholt, *et.all* (ed.), *Op.Cit.*

NEGERI DAN PELABUHAN LADA DI ACEH BARAT DAYA

A. Negeri dan Pelabuhan Susoh

Menurut folklore ketika orang Minangkabau datang ke Aceh Barat Daya, di sana sudah ada koloni Batak. Pada saat itu sempat terjadi perang antara pendatang baru dengan orang Batak 27 (Gayo) sehingga mereka tersingkir oleh pendatang baru dari Sumatera Barat maupun Aceh. Orang Batak 27, pada awalnya tidak menerima kedatangan asing dan agama baru sehingga mereka menyingkir ke pedalaman.

Mereka terpecah di Kabupaten Gayo Lues sekarang yang disebut kemudian sebagai Kejurun Patiambang hingga ke dataran tinggi Gayo yang dikenal dengan Belah Bebesan.²⁵ Orang Melayu Minangkabau dari Sumatera Barat diperkirakan mulai bermigrasi ke Aceh Barat Daya pada bagian kedua abad ke-17, terutama sejak Belanda berhasil mempengaruhi Pagaruyung dan menduduki daratan Padang, Sumatera Barat, yang sebelumnya di bawah pengawasan Kesultanan Aceh. Jumlah migrasi ini diperkirakan semakin bertambah ramai setelah penandatanganan Traktat Painan, antara penguasa lokal Sumatera Barat dengan Belanda pada 1663 di Batavia.

Orang Aceh dan orang Minangkabau yang tidak tunduk pada kekuasaan Belanda di Sumatera Barat bermigrasi ke Pantai

²⁵Folklore *Raja Dumet dan Puteri Barusyi* yang berkembang di Aceh Barat Daya. Namun, hal ini menjadi kontroversi karena berdasarkan penggalian arkeologis di Ceruk Mendale Aceh Tengah yang dilakukan Balai Arkeologi Medan telah menyimpulkan bahwa orang Gayo sudah ada sejak 3500 SM. Folklore itu menyebutkan kedatangan orang Minangkabau dari Pagaruyung yang merantau dan menata serta membangun negeri di Aceh Barat Daya.

Barat Selatan Aceh dan membangun beberapa negeri koloni seperti di Singkil, Tapaktuan, Samadua, Sawang, Meukek, Labuhanhaji, Lhok Pawoh, Susoh dan sebagian di Meulaboh sehingga lazim disebut *Jamee* (tamu) sedangkan keturunannya disebut *Aneuk Jamee* atau (anak keturunan tamu).²⁶

Di negeri Susoh, etnis Melayu Minangkabau (*Jamee* dan *Aneuk Jamee*) dipimpin Datok Bagak. Datok Bagak tinggal di Susoh dengan persetujuan penguasa lokal, yaitu orang Gayo (Batak 27) yang berkuasa di tempat tersebut. Datok Bagak menikah dengan anak perempuan Raja Batak. Akibatnya, sebagian orang Batak di daerah itu menganut Islam. Selain itu, juga berkat bantuan dari etnis Minangkabau lainnya yang ada di Nagan Raya yang dipimpin Datok Baginda yang sama-sama menaklukkan orang Batak yang tidak mau menerima agama Islam di negeri Susoh. Datok Bagak dan Datok Baginda juga membagi wilayah Negeri Susoh dan memerintah bersama-sama.²⁷

Datok Bagak (Datok Tuo) berasal dari suku Barat di Pariaman, Sumatera Barat. Mereka menguasai negeri di sebelah kiri Sungai Pinang yang dinamakan Kampung Barat. Sedangkan Datok Baginda (Datok Raja) menguasai sebelah kanan Sungai Pinang yang dinamakan Kampung Pinang.²⁸

Migrasi orang Minangkabau kemudian diizinkan oleh Datok Bagak untuk membuka pemukiman yang baru di wilayah negeri Susoh untuk bertani dan membuka *seuneubok lada*. Mereka berasal dari suku Kabung; Kampar Riau yang dipimpin oleh Datok Marah Padang. Mereka membuka lahan dan mendirikan Kampung Durian Rampak, juga dalam wewenang negeri Susoh.²⁹

Setelah itu terjadi lagi migrasi orang Minangkabau yang datang dari Rawo; Pariaman. Mereka dipimpin Datok Mageh Kesumba, yang diizinkan membuka lahan dan bertani di pedalaman negeri Susoh untuk membangun Kampung Rawa. Selanjutnya, datang kelompok Datok Baginda. Dia memiliki relasi dengan orang

²⁶Penetrasi Belanda di Sumatera Barat dan konflik dengan penguasa Aceh di sana disebut dalam M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : Percetakan Waspada, 1961), hlm. 384-400.

²⁷K.F.H. Van Langen, *Atjeh's Westkust Met Daarbij Behoorende Kaart*, (Leiden : E. J. Brill, 1888), hlm. 215-216.

²⁸J. Kreemer, *Atjeh: Algemeen Samenvatted Overzicht Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden*, (Leiden : E.J. Brill, 1923), hlm. 232.

²⁹*Ibid.*

Minangkabau yang ada di Seunagan yang dipimpin Datok Binca yang membuka dan membangun Kampung Pawoh.³⁰

Pada waktu itu, orang Minangkabau berada dalam lingkungan negeri yang wilayahnya dikuasai oleh orang Aceh. Kebebasan mereka dibatasi. Akan tetapi, mereka dapat mempertahankan adat-istiadat yang dibawa dari negerinya serta mempertahankan hubungan kekerabatan seperti di negeri asalnya, Sumatera Barat.³¹

Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alaidin Mansur Syah (1836-1870), dikirim lagi sebuah ekspedisi ke Panatai Barat Selatan Aceh untuk menertibkan penyeteroran pajak ke perwakilan Sultan Aceh di negeri Susoh. Pada saat itu, tim inspektorat Kesultanan Aceh dipimpin oleh Tuanku Husein, karena para pemimpin negeri Susoh sudah tidak membayarkan lagi pajak negeri dan cukai pelabuhannya ke Bandar Aceh Darussalam. Tim inspeksi Kesultanan Aceh itu dibantu oleh Datok Keng, keturunan Minangkabau dari Datok Baginda.³²

Pada saat pekayaran inspeksi itu, negeri Susoh pada saat itu dipimpin oleh Datok Kepala, keturunan dari Datok Tuo. Perang pun terjadi, akan tetapi kemudian berakhir dengan perdamaian setelah adanya diplomasi. Negeri Susoh diharuskan menghormati segala peraturan dan membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Kesultanan Aceh.

Perkembangan negeri Susoh sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dari negeri-negeri di sekitarnya, yaitu negeri Kuala Batu, Pulau Kayu, Kuta Batee (Blangpidie), Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan), Lhok Pawoh dan Manggeng. Antara negeri Susoh dengan negeri-negeri di sekitarnya kemudian terjalin hubungan kekeluargaan setelah adanya perkawinan di antara mereka yang sudah saling terjalin sejak lama.

Mata pencaharian penduduk negeri Susoh mayoritas petani yang menanam padi, pertambahan air tawar/muara, dan nelayan serta perdagangan ikan (*muge*). Olahan ikan kering, ebi dan garam banyak yang dipasarkan ke berbagai pelabuhan di Pantai Barat Selatan Aceh hingga ke Patiambang (dataran tinggi Gayo) melalui jalur setapak di Blangpidie.

³⁰K.F.H. van Langen, *Op. Cit.*, hlm. 216.

³¹*Ibid.*, hlm. 217-218.

³²Sultan Ibrahim dua kali memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam, pertama hingga 1836 dan kedua hingga 1870.

Dari tahun 1778 hingga setengah abad lamanya Pantai Barat Selatan Aceh hingga Barus terbebas dari ancaman Belanda. Pada saat itu, kegiatan perdagangan termasuk transaksi langsung dengan kapal-kapal dagang Eropa dan Amerika sudah terjadi selama beberapa tahun pada pergantian abad ke-18 hingga awal abad 19 yang berjalan mulus tanpa diganggu secara langsung oleh Belanda.

Kedatangan kapal-kapal Eropa dan Amerika saat itu bisa langsung ke pusat produksi lada membuat pasar lada sangat ramai dengan harga yang kompetitif. Otoritas sultan di ibukota Bandar Aceh ke Pantai Barat Selatan Aceh saat itu sudah sangat melemah, terutama sejak pertengahan abad ke-18. Keadaan politik di negeri Trumon atau lebih ke Selatan lagi seperti Singkil menjadi semakin kabur, meskipun mereka sudah sejak lama menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, terutama pada pergantian abad ke-19.

Di sisi lain, meningkatnya kegiatan perekonomian komoditas lada di daerah ini juga memancing kedatangan dari kelompok petani dari luar. Kegiatan ini menandai terjadinya pertumbuhan negeri-negeri yang baru. Salah satunya negeri Trumon yang berkembang setelah kedatangan pemimpin XXV Mukim Aceh Besar, beserta dengan pengikutnya. Mereka adalah migrasi dari negeri Susoh di Selatan Meulaboh dalam konteks masa lalu.

Setelah sukses memegang otoritas di pelabuhan negeri Susoh bersama dengan kepala negeri Susoh, anaknya yang pertama bernama Basa Bujang yang kemudian pindah dan membangun negeri Trumon. Sedangkan anak kedua bernama Lebai Dapa pindah ke Singkil dan berhasil mengembangkan pertanian lada di daerah tersebut.³³

Raja Singkil bersimpati padanya dan menikahkan putrinya dengan Leube Dafa sehingga digelar nama Tuanku Singkil atau Teuku Jakfar. Raja Singkil kemudian menyerahkan kepemimpinan daerahnya kepada menantunya itu. Sebaliknya, Basa Bujang yang kurang berhasil membangun pertanian lada di negeri Trumon mengundang adiknya Leube Jakfar agar berpindah ke negeri Trumon. Usulan itu disetujui adiknya tanpa melepaskan posisi dan kedudukannya sebagai raja di Singkil.

Negeri Trumon dan Singkil akhirnya sama-sama berkembang menjadi penghasil lada dan terus meningkatkan

³³K.F.H. Van Langen, *Atjeh's Westkust Met Daarbij Baheoorende Kaart*, Leiden: E.J. Brill, 1888, hlm.215-216.

pendapatan dan kesejahteraannya serta menaikkan derajat pemimpinnya. Hal ini justru terjadi pada saat penghasilan Kesultanan Aceh sedang merosot.

Ketika Leube Djafa meninggal, beliau meninggalkan sejumlah 17 anak, 7 orang putra dan 10 putri. Anaknya yang bernama Raja Bujang mewarisi kekuasaannya di Trumon. Sedangkan anak yang kedua, Raja Muhammad Arif mewarisi Singkil. Sebenarnya, Leube Djafa atau Teungku Jakfar merupakan salah satu penentang Sultan Alaidin Jauhar Alam Syah. Dia bersekongkol dengan paman sultan, Tuanku Raja sebagai pemangku Sultan Alaidin Jauhar Alam Syah. Mereka berdua sama-sama meraup keuntungan dan juga sama-sama melakukan pembangkangan terhadap Sultan Aceh pada masa itu. Mereka tidak pernah menyetorkan pajak dan *wase* pelabuhan dari negeri-negeri vasal Aceh kepada bendahara Kesultanan Aceh di Bandar Aceh.

Kapten Canning (*EIC*-Inggris) yang meninjau Aceh atas perintah Gubernur Jenderal *EIC* di Calcutta, India menyebutkan, Leube Daffa menguasai pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat Selatan Aceh, yaitu Singkil, Bulohseuma, Trumon, Susoh dan Kuala Batu dengan penduduk sekitar 27.750.³⁴ Pada puncak panen lada, di negeri Trumon saja mereka mampu mengeksport sekitar 40.000 pikul lada per tahun.

Negeri Trumon di bawah Raja Bujang sangat makmur sehingga mampu membangun istana yang dikelilingi dengan tembok batu dengan benteng setinggi 10 kaki yang dilengkapi dengan 32 pucuk meriam. Di sekeliling istananya juga dibangun parit-parit untuk membendung serangan dari musuh. Raja Bujang memiliki beberapa kapal untuk mengangkut lada negeri Trumon ke Padang, Bengkulu, Batavia, Temasik, Penang, bahkan Batavia dengan pendapatan pelabuhan mencapai 100.000 Peso dari pungutan ekspor dan impor lada sebesar 5%.

Saat itu, hasil pelabuhan negeri Trumon tidak lagi dikirim ke Bandar Aceh karena negeri Trumon sudah memakai bendera kerajaan sendiri. Raja Bujang beristerikan perempuan keturunan Prancis dari Padang yang bernama Nona Gadis yang melahirkan seorang anak laki-laki bernama Nyak Banta. Sementara di pusat

³⁴John Anderson, *Op.Cit.*, hlm. 51. Canning mencatat bahwa tidak semua pelabuhan kecil itu ikut membangkang. Singkil misalnya mengirim *wase* kepada sultan berupa kapur barus dan kemenyan, senilai \$3000 setahun. Kepatuhan itu juga dilakukan oleh Barus, Tapaktuan dan Ligan, namun mungkin ini relatif.

Kesultanan Aceh, Sultan Alaidin Jauhar Alam Syah wafat pada Desember 1823.

Pewaris Kesultanan Aceh yang sudah ditetapkan adalah putra almarhum dari isteri permaisuri Tuanku Ibrahim. Akan tetapi, Panglima Sago memutuskan lain, yaitu mengangkat anak sultan tertua dari isteri biasa yang bernama Tuanku Darid (Tuanku Daud). Beliau bergelar Sultan Alaudin Muhammad Syah.

Tuanku Ibrahim pada saat itu ditugaskan untuk memelihara ketertiban keamanan dan ketaatan di Pantai Barat Selatan Aceh, untuk mengutip pajak dan cukai lainnya. Beliau sangat aktif, cerdas, berani, dan tidak ambisius juga bersungguh-sungguh menjalankan tugas Kesultanan Aceh.

Tidak heran, jika sultan memilihnya sebagai pewaris tahta. Akan tetapi, Tuanku Ibrahim tidak pernah menentang keputusan para Panglima Sago yang menolaknya sebagai sultan. Beliau banyak membantu saudaranya itu dan berbakti untuk stabilitas Kesultanan Aceh, karena menyadari kesultanan perlu dibina kembali, sekaligus membangun kekuatan, wibawa, serta tata-tertibnya.

Upayanya berhasil, berbagai rongrongan Belanda dapat ditutup dengan terbuka, dan berangsur-angsur dapat dicegah. Bahkan, ketika Sultan Daud mangkat, juga keluar lagi keputusan Panglima Sago untuk menetapkan putra almarhum, yaitu Sultan Muhammad Syah yang bernama Tuanku Sulaiman sebagai sultan yang baru.

Tuanku Ibrahim masih saja tetap menerima keputusan itu. Namun, ada kecurigaan Sultan Ibrahim sebenarnya yang memegang kendali tahta kesultanan karena Panglima Sago XXII yang menggulingkan Tuanku Sulaiman (Sultan Ali Iskandar) tiga bulan setelah diangkat jadi sultan. Berdasarkan *Nota over de Geschiedenis van het Landschapp Pidie*, Kapten Veltman menyebutkan Tuanku Ibrahim naik tahta setelah Tuanku Sulaiman meninggal dunia. Pada nota ini Veltman menemui silsilahnya pada kantor *controleur* (pengawas Belanda) di Sigli saat dia bertugas di sana. Dalam dokumen tersebut, Tuanku Sulaiman disebut menikahi putri dari Tuanku Ibrahim, yang bernama Putri Saribanun.

Tuanku Ibrahim juga yang mengeluarkan Sarakata Pidie pada 8 Rajab 1269 Hijriah (24 April 1853) dengan tandatangannya. Jika itu benar, maka menurut pendapat Veltman, artinya Tuanku Ibrahim adalah Sultan Aceh pada 1853. Catatan lain yang diperoleh ketika Courier dit Dubekart berada di Bandar Aceh pada 1855, pada waktu itu Sultan Aceh di tangan Tuanku Ibrahim. Pada saat yang

bersamaan dengan penugasannya sebagai wakil Kesultanan Aceh ke Pantai Barat Selatan.

Namun, pada saat bersamaan ditetapkan saudara sultan lainnya yang bernama Tuanku Raja Muda bergelar Tuanku Rumoh Panjang yang ditugaskan ke Pantai Utara Aceh; yaitu Samalanga, Lhokseumawe, dan sekitarnya. Adik sultan lainnya Tuanku Abbas ditugaskan ke Pidie yang berkedudukan di Batee.³⁵

B. Negeri dan Pelabuhan Pulau Kayu

Negeri dan pelabuhan Pulau Kayu pada awalnya berada di wilayah negeri Kuta Batee (Blangpidie). Negeri ini pada awalnya termasuk dalam wilayah negeri Susoh. Orang yang mendiami bagian Utara negeri Pulau Kayu ini adalah orang Gayo yang terdesak oleh orang Minangkabau yang datang dan menyebarkan ajaran Islam.

Kedatangan orang Aceh dari Aceh Besar dan Pidie ke negeri ini pada awalnya dipimpin Teungku Di Lhong (tidak sama dengan tokoh ulama abad ke-20). Dalam waktu yang hampir bersamaan, datang lagi kelompok petani lada dari Pidie dipimpin Teuku Lampoh Deu yang menduduki hulu sungai Krueng Susoh, di dataran yang dinamakan Kuta Batee. Mereka membuka *seuneubok lada* (lahan lada) sekaligus berladang dan membuat sawah untuk menanam padi.

Setelah itu, datang kelompok orang Pidie dipimpin Teuku Ben Agam menduduki daerah Pulo Dua (di wilayah *gampong* Keudesiblah sekarang). Pada awal abad ke-19, datang lagi kelompok Teuku Keucik Bo Kuta yang menduduki wilayah Kutatinggi. Sedangkan kelompok Panglima Langsa menduduki Lampoh Drien hingga ke seberang sungai Krueng Susoh di Seunaloh kini. Sedangkan kelompok Pidie yang dipimpin Pang Ujoh menduduki daerah yang dinamakan Kuta Tuha.

Pada awalnya kelompok pendatang membentuk semacam koloni di wilayah *seuneubok lada* dan *seuneunok pade* masing-masing. Mereka yang awalnya mandiri dan terlepas dari satu kelompok dengan kelompok lain. Akan tetapi, mereka juga saling curiga-mencurigai sehingga sering terjadi bentrokan bahkan perang

³⁵Tarling, Nicholas, 1957, "Sumatra and The Archipelago", dalam *British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871*, JIMBRAS, hlm.1, mencatat bahwa suasana di Aceh pada tahun 1851 sedang kusut. Tuanku Ibrahim ingin menggantikan menantunya Sultan Ali Iskandar Syah. Ketika ia jadi pemangku. Namun keterangan ini tidak jelas karena Tarling tidak menyebutkan sumber.

di antara kelompok. Perang pernah terjadi antara orang-orang dari kelompok Aceh dan Pidie serta dengan orang-orang Minangkabau. Perang di antara etnis Aceh dan Minangkabau terus berlanjut.³⁶ Perang berakhir ketika Tuanku Husin bin Sultan Ibrahim (Sultan Alaidin Mansyur Syah 1836-1870) datang ke pelabuhan Susoh dan berhasil mendamaikan pihak-pihak bertikai. Akibatnya, Negeri Blangpidie (Kuta Batee) yang dipimpin Teuku Ben Agam diakui sebagai negeri yang merdeka dari negeri Susoh.

Setelah pemimpin Negeri Kuta Batee (Blangpidie) Teuku Ben Agam meninggal, digantikan oleh anaknya Teuku Ben Abbas sehingga sampai pada anaknya Teuku Ben Mahmud.³⁷ Sejak kecil Teuku Ben Mahmud sudah ditabalkan sebagai *uleebalang* yang diwakili oleh pemangku raja, Teuku Raja Sawang, suami dari bibinya. Teuku Raja Sawang *uleebalang* di negeri Pulau Kayu juga sebagai *uleebalang* Kuta Batee (Blangpidie) yang menandatangani *korte verklaring* dengan Belanda pada 1874.

Pada awal abad ke-19, *uleebalang* negeri Pulau Kayu adalah Teuku Nyak Syeh. Namun, setelah Teuku Nyak Syeh wafat, digantikan oleh anaknya, Teuku Nyak Husin. Teuku Nyak Husin kemudian digantikan oleh anaknya Teuku Nyak Raja Sawang sehingga berakhir pada masa Teuku Raja Cut, anak dari Teuku Raja Sawang.

Pada saat Teuku Raja Cut kecil, ibunya menikah lagi dengan raja Kuta Batee (Blangpidie), Teuku Ben Mahmud.³⁸ Akibat perkawinan ini, hubungan antara Kuta Batee (Blangpidie) dengan Pulau Kayu bermula dari Teuku Nyak Syeh yang menikahi Nyak Buleun, cucu perempuan *uleebalang* Kuta Batee (Blangpidie) yang pertama, Teuku Ben Agam.

Pada 1875, Teuku Ben Mahmud memerintah Kuta Batee (Blangpidie) berdasarkan mandat dari perwakilan Sultan Aceh Muhammad Daud Syah. Sultan Aceh menggelari Teuku Ben Mahmud dengan tambahan "Setia Raja". Sedangkan *besluit* Belanda mengatakan *uleebalang* daerah ini dijabat oleh Teuku Nyak Raja Sawang. Hal ini tertuang dalam *korte verklaring* Pulau Kayu pada 1874.³⁹

³⁶Suasana perang antar kelompok lihat Hikayat Teungku Di Meukek yang terjadi di Meulaboh

³⁷*Ibid*, hlm. 214.

³⁸*Ibid*., hlm.212-213.

³⁹*Ibid*, hlm. 64. Teuku Raja Sawang berasal dari Ie Leube, Pidie. Berdasarkan sebuah sumber dari catatan Belanda, *Mededeeling van de Afdeeling*

Kesepakatan saat menandatangani perjanjian *korte verklaring* itu beliau memohon pada Belanda agar Pulau Kayu dimandirikan dari Kuta Batee (Blangpidie). Pengukuhan perjanjian itu konon dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 15 Juni 1901 saat Teuku Raja Cut memerintah. Akan tetapi, persetujuan tersebut tidak pernah terlaksana karena Teuku Raja Cut mangkat. Lama-kelamaan keturunan Teuku Ben Agam, Teuku Ben Abbas dan Teuku Ben Mahmud dianggap sebagai penguasa yang mewarisi kedua negeri tersebut.

Pada 1910, saat Belanda berkuasa, Kuta Batee (Blangpidie) dibagi dalam empat *Uleebalang cut*, yaitu *Uleebalang cut* Pulau Kayu yang dipimpin oleh Teuku Uma, mertua Teuku Raja Cut dengan wilayah; Keude Pulau Kayu, Alue Sungai Pinang, Guhang, Ladang Neubok, Padang Geulumpang, Ikue Lhueng, Paya Pisang Klat, Lhueng Tarok, Lhueng Asan, Gunong Cut, dan Alue Rambot. *Uleebalang cut* Kuta Tuha dipimpin oleh Teuku Ben Mahmud; meliputi Kuta Batee dan Pante Ara (kemudian berkembang ditambah Keudesiblah). *Uleebalang cut* Lampoh Drien yang dikuasai oleh Teuku Dirih meliputi daerah; Seunaloh, Kuta Padang, Kuta Tutong, Lampoh Drien, Alue Badeuk, serta Alue Keubeu Jagat. *Uleebalang cut* Kutatinggi dikuasai oleh Teuku Lampoh U dengan anaknya Teuku Raja Itam meliputi Mata Ie, Kuta Tinggi, Panton Seumancang dan Paya.⁴⁰

Penguasa Pulau Kayu dan Kuta Batee (Blangpidie) membuka pelabuhan di Pulau Kayu pada masa Datok Mak Obat. Saat itu, dia mengontrak Po Adam atau Teuku Lambada Adam penduduk Kuala Batu untuk menjabat syahbandar di Pulau Kayu. Pada awal abad ke-19, Po Adam atau Teuku Lambada Adam dianggap banyak merugikan Datok Mak Obat sehingga jabatan syahbandar dari Po Adam dicabut dan diserahkan kepada Teuku Nyak Syeh. Teuku Nyak Syeh adalah suami Nyak Buleun cucu pendiri negeri Kuta Batee. Akibatnya, para penerus syahbandar dan penguasa perdagangan lada di Pulau Kayu juga sebagai raja di Kuta Batee atau Blangpidie. Pembeli lada di Pulau Kayu adalah para pedagang dari Amerika yang dirintis oleh Teuku Lambada Adam. Akan tetapi,

Bestuurszaken der Buitengewesten het Departement van BB Serie A3, menyebutkan bahwa Blangpidie dan Susoh menandatangani *Korte Verklaring* pada 1874 yang dikukuhkan pada 1875.

⁴⁰ J. Kreemer, *Op. Cit.*, hlm. 232.

syahbandar Pulau Kayu digantikan Teuku Nyak Syeh. Po Adam atau 'sahabat' pedagang Amerika diberhentikan jabatannya sebagai syahbandar dan menetap kembali di Kuala Batu.



Gambar 1. Prasasti Makam Shewbuntar (Syahbandar? atau Po Adam) yang konon dibuat untuk mengenang persahabatannya dengan Amerika dengan Syahbandar Po Adam yang meninggal pada 1824.

C. Negeri dan Pelabuhan Lhok Pawoh

Negeri Lhok Pawoh berbatasan dengan Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan). Pada masa pemerintahan Belanda negeri ini dibagi empat wilayah *uleebalang cut*, yaitu; Suak, Tangan-Tangan Cut, Tangan-Tangan Rayek, dan Lhok Pawoh Utara. Akan tetapi, J.Kreemer menambah satu daerah lagi, yaitu; *uleebalang cut* Babah Lhok.⁴¹

Negeri Lhok Pawoh Utara dan negeri Lhok Pawoh ini terletak di sepanjang pantai di Samudera Hindia mulai dari Kuala Sangkalan berbatasan dengan Susoh hingga di ujung sungai Lhok Pawoh sebagai berbatasan dengan Manggeng. Pada awalnya Lhok Pawoh dan Lhok Pawoh Utara termasuk ke dalam wilayah negeri Susoh. Akan tetapi, mereka memisahkan diri dari negeri Susoh.⁴²

Datuk Susoh memberi izin kepada Panglima Bantan dan Panglima Giri dari XXV Mukim Aceh Besar membuka perkebunan lada di daerah itu dengan syarat harus membayar pajak lada pada perwakilan sultan di Negeri Susoh. Kewajiban membayar pajak kepada perwakilan sultan Aceh itu hanya dipenuhi selama dua tahun masa panen lada, kemudian mereka tidak mau membayarkan pajak lagi.⁴³

⁴¹*Ibid.*, hlm. 233.

⁴²K.F.H. van Langen, *Op. Cit.*, hlm. 221.

⁴³*Ibid.*

Tok Kada dipercaya oleh Datok Susoh sebagai ketua kelompok petani lada (*peutuha seuneubok lada*) dari XXII Mukim Aceh Besar. Mereka membuka perkebunan lada di Lhok Pawoh Utara setelah berhasil memerangi dan mengusir kelompok *seuneubok* lada yang dipimpin Panglima Bantan, dan Panglima Giri. Akibat terdesak dan kalah perang, Panglima Bantan dan Panglima Giri melarikan diri sehingga Datok Susoh menyerahkan wilayah tersebut kepada Tok Kada. Dengan demikian, kedua wilayah lainnya, yaitu Tangan-Tangan Cut, dan Tangan-Tangan Rayek juga diserahkan kepada Tok Kada.

Namun, syaratnya harus membayar pajak setiap kali panen lada dan ketika membuka lahan pertanian yang baru di daerah itu harus seizin dirinya. Akan tetapi, perjanjian itu hanya terlaksana selama dua tahun, setelah itu diingkari Tok Kada, sehingga terjadi perang antara Tok Kada dengan Datok Susoh. Perang berakhir setelah dilakukan “tukar anak”. Anak Tok Kada bernama Cut Hajat dari Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) ditukarkan dengan anak Datok Bagak bernama Panglima Mak Tek dari negeri Susoh. Setelah dewasa Cut Hajat dinikahkan dengan perempuan dari Susoh yang merupakan keturunan dari Minangkabau. Sedangkan Panglima Mak Tek dari negeri Susoh dinikahkan dengan anak perempuan Tok Kada dari negeri Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan).⁴⁴

Pada 1880, negeri Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) menandatangani perjanjian singkat atau *korte verklaring* sebagai tanda persahabatan dengan Belanda. Keempat wilayah *uleeбалang* itu diperintah oleh Teuku Cut Ahmad anak Teuku Cut Hajat yang telah menikah dengan putri Tuanku Raja Kecil dari Seuneuam (Kabupaten Nagan Raya) pada 1888.

Pada waktu itu, penduduk di wilayah itu berasal XXII Mukim Aceh Besar. Sebagian lagi berasal dari Minangkabau. Mereka berdiam di keempat wilayah *uleeбалang* itu. Sebagian lainnya terpecah-pecah di perkebunan lada. Mata pencarian penduduk negerinya menanam di sawah dan berladang. Penanaman lada sering mengalami kegagalan karena sering terjadi perang saudara serta kekacauan di wilayah internalnya. Hasil-hasil perdagangan daerah ini dikirim melalui pelabuhan di negeri Susoh.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 221.

⁴⁵*Ibid.*

D. Negeri Manggeng

Negeri Manggeng meliputi Pantai Barat Selatan Aceh yang dimulai dari ujung Lhok Pawoh di perbatasan dengan Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) hingga ke kuala Pawoh Baru atau muara sungai Krueng Baru di perbatasan Labuhan Haji, di Kabupaten Aceh Selatan.

Negeri Manggeng dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu; Bak Weu dan Manggeng. Bak Weu, wilayahnya mulai dari sungai Krueng Manggeng hingga ke sungai Krueng Baru di perbatasan dengan Labuhanhaji, Aceh Selatan sekarang. Sedangkan Manggeng, wilayahnya sejak dari sungai Krueng Manggeng hingga Lhok Pawoh di perbatasan dengan Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan). Kedua wilayah tersebut di bawah pimpinan Datok Besar.

Negeri Manggeng merupakan bagian wilayah negeri Susoh. Akan tetapi setelah Panglima Bantan dan Panglima Giri tersingkir dari Suak (Suak Setia) mereka berpindah ke negeri ini setelah kalah perang dengan Tok Kada. Seluruh pengikutnya menyerah dan memohon pada Datok Susoh agar diperkenankan menetap di negeri Manggeng. Mereka diizinkan tinggal di wilayah itu dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mengakui Datok Besar sebagai *uleebalang*. Negeri ini setelah Datok Besar meninggal, dilanjutkan oleh anak bungsunya bernama Cut Hajat yang dilahirkan di Aceh Besar. Dia memimpin negeri Manggeng, karena abangnya mengalami cacat mental dan gangguan kejiwaan.⁴⁶ Setelah Cut Hajat meninggal, raja ini digantikan oleh adik sepupunya Datok Dolah. Akan tetapi, karena berbuat kesalahan, dia digantikan oleh sepupunya Teuku Nyak Hasan. Negeri Manggeng menandatangani *korte verklaring* dengan Hindia Belanda pada 1881.⁴⁷

Penduduk negeri Manggeng berasal dari XXV Mukim Aceh Besar yang bercampur dengan orang Minangkabau. Mereka mendiami Manggeng sebelah Barat sungai Krueng Manggeng. Negeri Bak Weu di Selatan sungai Krueng Manggeng penduduknya tersebar di perkebunan lada (*seuneubok lada*) dan ladang padi. Mata pencaharian negeri Manggeng pada masa itu mayoritas bertani padi di ladang. Mereka jarang menanam padi di persawahan. Komoditas lada tidak berkembang dan kurang subur di negeri Manggeng dan

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 222.

⁴⁷*Ibid.*

negeri Bak Weu. Hasil pertanian padi dan hutan lainnya lebih banyak dikirim melalui pelabuhan Susoh.⁴⁸

Tinggalan di negeri Manggeng (Ujong Manggeng) adalah beberapa toponim nama gampong dan benda diduga cagar budaya berupa struktur benteng, beberapa meriam, dan makam Teung Lhok Pawoh di sisi Timur muara Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng.

E. Negeri dan Pelabuhan Kuala Batu

Kuala Batu awalnya dibuka para pendatang Aceh Besar dan Pidie dengan izin dari penguasa di negeri Susoh. Wilayah ini terletak di muara sungai Krueng Babah Rot. Daerahnya subur karena setiap tahunnya sering mendapatkan endapan humus dari pedalaman pegunungan Bukit Barisan dan Taman Nasional Gunung Leuser.

Negeri Kuala Batu ini sangat cocok untuk komoditas lada dan padi. Posisinya sangat strategis, karena berada pada jalur lalu-lintas atau transportasi kapal-kapal layar pedagang dunia dari Samudera Hindia (Indonesia) menuju ke Barat (India). Setelah Portugis menguasai Malaka pada 1511, pedagang muslim di nusantara memilih jalur perdagangan yang melewati Pantai Barat Sumatera ke Bandar Aceh Darussalam ketika berdagang ke India.

Kuala Batu merupakan wilayah negeri Susoh. Pembukaan *seuneubok* lada di Kuala Batu dirintis oleh Keucik Karim. Awalnya, dia meminta izin kepada Datok Susoh membuka perkebunan lada di Lama Inong, suatu daerah di pedalaman Kuala Batu. Setelah perizinan disetujui, Keuchik Karim berjanji akan membayar pajak (*wase* dan cukai) *seuneubok* ladanya kepada Datok Susoh sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Kesultanan Aceh di Pantai Barat Selatan Aceh.⁴⁹

Pada saat itu, Leube Dafa yang telah pindah dari Susoh dan berkuasa di negeri Trumon dan Singkil, merupakan 'perwakilan sultan' yang mengutip pajak di daerah Pantai Barat Selatan Aceh. Pada awalnya, Keuchik Karim tertib membayar *wase* dan pajak *seuneubok* dan perdagangan lada di pelabuhan. Akan tetapi, kemudian tidak tertib lagi membayar *wase seuneubok* dan cukai lada di pelabuhan kepada perwakilan sultan di Susoh.

Kapal-kapal dagang asing dari Amerika dan Eropa yang seharusnya memuat lada di pelabuhan Susoh, juga mulai berpindah ke pelabuhan Kuala Batu. Akibatnya, negeri Susoh mengalami

⁴⁸K.F.H. van Langen, *Op. Cit.*, hlm. 222-223.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 210.

kerugian yang sangat besar karena peralihan pelabuhan itu.⁵⁰ Sebelumnya, jaringan bisnis pelayaran dan perdagangan Kesultanan Aceh dipegang oleh Leube Dafa yang mendapat keuntungan yang banyak dari komisi mamupun biaya pengangkutan lada ke pelabuhan dan saat mengunggah ke kapal.

Leube Dafa terpaksa berunding dengan Datok Susoh agar menyetujui dan diperbolehkan membuka pelabuhan Kuala Batu secara resmi perdagangan lada di Pantai Barat Selatan Aceh. Untuk itu, diperlukan suatu pengawasan dan kontrol hegemoni Kesultanan Aceh di wilayah Kuala Batu yang diserahkan langsung kepada kedua anaknya, Teuku Nyak Haji dan Raja Bujang. Namun, hal itu tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan karena Leube Dafa meninggal dunia. Akibatnya, perjanjian kesepakatan dan pemungutan pajak itu tidak berjalan seperti yang direncanakan.⁵¹

Negeri Kuala Batu berkali-kali diserang oleh Datok Susoh yang beraliansi dengan Trumon sebagai perwakilan sultan Aceh karena tidak mau membayar pajak lada. Perang berimbang, karena kemenangan diperoleh secara bergantian di antara kedua negeri yang bertikai. Konflik berakhir setelah berlangsungnya perkawinan antara anak laki-laki Teuku Lama bernama Raja Kuala dengan cucu raja Susoh, Datok Bagak.⁵² Namun, setelah Teuku Lama mangkat, kekuasaan Kuala Batu dipegang Raja Pidie, adiknya. Raja Pidie berpengalaman bidang mengelola pemerintahan dan negosiasi perdamaian di antara negeri Kuala Batu melawan negeri Susoh dan sekutunya negeri Trumon. Ia menghadap langsung kepada sultan di Bandar Aceh untuk berdiplomasi bagi kemandirian Kuala Batu dari pengaruh Susoh.

Raja Pidie pada akhirnya menikahi perempuan Susoh keturunan Air Bangis, Sumatera Barat. Perkawinan ini menurunkan silsilah seorang laki-laki yang bernama Raja Sulaiman. Setelah Raja Pidie meninggal dunia, maka anaknya Raja Sulaiman yang memerintah di sebelah kiri muara sungai Krueng Batu.

Muara sungai sebelah kanan Kuala Batu dikuasai oleh Pocut Hasan, anak dari Pocut Abdullah. Dia berasal dari XXVI Mukim, Aceh Besar. Raja Pidie dan Pocut Hasan (Aceh Besar) datang bersamaan dengan Pocut Kuala pada masa Raja Pidie memimpin di Kuala Batu. Menurut catatan Belanda, Raja Sulaiman memerintah di Kuala Batu

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 210-211.

hingga berhasil dipengaruhi oleh Hindia Belanda dengan *korte verklaring* pada 1881.⁵³

Ada tiga negeri di Kuala Batu, yaitu; (1) wilayah negeri milik Raja Sulaiman yang meliputi; Madat Manyang, Sarulah, Sikabu, Truebue, Lama Inong, dan Siangen-Angen; (2) wilayah negeri milik Pocut Hasan, meliputi Lhok Ek, Kuta Raya, dan Kuta Cot Dolah; (3) wilayah negeri Kuala Batu meliputi Seumayam, Surien, Lama Tuha, dan Lama Muda.⁵⁴

Pada awalnya pemimpin komunitas Pidie, Keucik Karim yang meminta izin Datuk Susoh untuk membuka pertanian lada di pedalaman Kuala Batu. Permohonan disetujui dengan syarat harus membayar pajak (*wasee*) kepada Datuk Susoh dan perwakilan Sultan Aceh.⁵⁵ Leube Daffa yang ditunjuk sebagai wakil Sultan Aceh berdomisili di Trumon yang bertugas sebagai pengutip *wase* untuk seluruh daerah Pantai Barat Aceh.

Keucik Karim yang bergelar Teuku Lama berdomisili di Lama Inong, pedalaman Kuala Batu. Pada awalnya dia memenuhi semua beban pajak yang menjadi kewajibannya. Namun, dalam masa panen selanjutnya sudah mengingkari perjanjian yang telah menjadi kewajibannya kepada perwakilan Sultan Aceh tersebut. Demikian juga kapal-kapal yang seharusnya memuat lada di pelabuhan Susoh mulai dialihkannya langsung ke Kuala Batu. Akibatnya Susoh mengalami kerugian yang besar karena penurunan pemasukan dari *wasee* pelabuhan, terutama penghasilan dan laba dan komisi sistem transportasi serta perdagangan lada serta hasil bumi lainnya.⁵⁶

Menyikapi kondisi tersebut, Leube Djafa, Datuk Susoh, dan Teuku Di Lama berunding untuk menyetujui keberadaan pelabuhan Kuala Batu sebagai salah satu pelabuhan yang resmi di Pantai Barat Selatan Aceh. Tugas terhadap “kontrol hegemoni sultan” atas pelabuhan Kuala Batu nantinya diserahkan kepada anak Leube Dafa, yaitu; Teuku Nyak Haji dan Raja Bujang. Hal itu tidak pernah terwujud karena Leube Dafa terlebih dulu meninggal dunia.⁵⁷ Akibatnya Kuala Batu diserang oleh Datuk Susoh yang dibantu oleh Trumon. Peperangan terus berlangsung antara kedua belah pihak

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ K.F.H. van Langen, dalam *ibid*, hlm. 210.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

dan kemenangan dan kekalahan diperoleh secara bergantian. Konflik itu, baru berakhir setelah adanya ikatan perkawinan antara anak Teuku Lama, Raja Kuala penguasa Kuala Batu dengan cucu Datuk Bagak dari Susoh.⁵⁸

Penduduk Kuala Batu pada masa itu mayoritas mengusahakan pertanian lada, menanam padi, mengumpulkan hasil hutan dan perdagangan maritim yang berpusat di sekitar pelabuhan. Kuala Batu dalam perjalanan sejarah juga dikenal sebagai pusat perdagangan komoditas lada dunia pada masa lalu, namun kota ini hancur-lebur usai diserang oleh armada angkatan laut Amerika dengan kapal perang *Potomac* pada 1832.⁵⁹

Sejak akhir abad ke-18 (1798-1799) pedagang Amerika hadir di Kuala Batu. Sejak saat itu hingga pada 1870 kapal dagangnya setelah memuat lada di Kuala Batu sebagian besar kembali bersandar ke pelabuhan Salem, Boston. Pihak pelabuhan mencatat terjadi lebih 1.000 kali pelayaran yang memuat lada seharga £370.000.000.-. Harga itu diperkirakan setara dengan \$17.000.000.- dolar. Jumlah itu, setengahnya merupakan dari komoditas lada yang dihasilkan negeri-negeri di Aceh dalam periode itu, sedangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan pedagang Amerika termasuk sangat rendah, karena menggunakan kapal cepat sehingga dapat bersaing dengan Inggris dan Belanda dalam perdagangan lada di sana.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.* hlm. 210-211.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi antara lain; Meulaboh, Tapaktuan, Trumon, dan Singkil. Ada pula pelabuhan yang didatanginya langsung seperti Rigaih, Meukek, Labuhan Haji, Kuala Batu, Susoh, Asahan, Said, M., *Aceh Sepanjang Abad*, Medan; Waspada, hlm.509

PENUTUP

A. Kesimpulan

Munculnya negeri dan pelabuhan lada karena adanya komoditas dan perdagangan lada yang mulai ramai sejak 1789 di Pantai Barat Selatan Aceh khususnya Aceh Barat Daya yang mulai menjalin hubungan diplomasi dagang dengan Amerika. Kapal-kapal Eropa dan Amerika datang untuk memuat lada. Pedagang Amerika mengangkut lada dari Pantai Barat Selatan Aceh ke Pelabuhan Salem, Boston Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekitar 42.000 pikul, sekira 3.000 ton.

Ketika harga lada di pasaran dunia merosot pada 1829, jumlah kapal Amerika yang datang ke Kuala Batu mulai menurun. Kapal-kapal Amerika yang datang pada masa depresi ekonomi dunia saat itu. Bahkan pada 1831 sebuah kapal dagangnya *Friendship* diserang oleh bajak laut di Kuala Batu sehingga Amerika murka dan membalas hukuman dan menghancurkan Kuala Batu dengan kapal militer *Potomac* pada 6 Februari 1832.

B. Saran

Dari kajian Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya, disarankan beberapa hal:

1. Perlu untuk mengkaji, menggali, dan melestarikan nilai-nilai historis yang berdimensi sejarah terutama diplomasi dan hubungan dunia dalam menguatkan jatidiri sebagai bangsa yang besar, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai historis dan nilai edukatif yang sangat membanggakan.

2. Tinggalan atau puing-puing negeri dan tinggalan pelabuhan sebagai jejak bersejarah yang tak terbantahkan harus terus dipelihara dan dilestarikan mengingat tindakan ‘vandalisme’ berupa penguasaan terhadap tanah di kawasan itu sudah sangat lama terjadi, sehingga telah merubah ‘wajah yang bersejarah’ menjadi ‘kabur’. Mengaitkan toponimi lama yang berbahasa Melayu pada nama negeri seperti “Kuala Batu, Pulau Kayu, Susoh, Teluk Pawoh, Labuhan Haji, dan Meukek”. Dulu jalur rempah ini sangat maju menjadi “terisolasi” dan “terpinggirkan” di Aceh Barat Daya semenjak dihancurkan oleh kapal perang Amerika pada 6 Februari 1832.
3. Pemandahan (insitu) dari meriam-meriam yang ada di benteng-benteng lokal untuk berbagai kepentingan telah menghilangkan bukti-bukti dari abad kekayaan dan kejayaan jalur rempah serta sebagai jalur perdagangan dunia yang masih berbekas, yang bernilai historis, edukatif, dan rekreatif untuk masa kini dan mendatang sebagai potensi yang belum tergarap dengan sempurna.
4. Perlu penataan kembali kawasan jalur rempah sebagai kawasan wisata yang bersejarah dan melengkapinya dengan sarana rekreatif dan edukatif bagi masyarakat di Aceh Barat Daya. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya pemahaman dan penghargaan terhadap kegemilangan masa lampau, dan sebagai sarana edukatif serta rekreatif bagi generasi muda (x dan z).
5. Perlu penataan dan zonasi serta pemetaan ulang terhadap kawasan bersejarah di Aceh Barat Daya ini, karena sebagian kawasan dugaan situs di daerah tersebut kini beralih fungsi menjadi lahan produktif milik individu maupun korporasi yaitu sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Referensi

- Ahmad. Zakaria, 2007, *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah menuju Daerah Otonom*, Blangpidie: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- _____, 1972, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Monora.
- Anderson, John, 1840, *Acheen and The Port on The North and East Coast of Sumatra with Incidental Notices of the Trade in the Eastern Seas and the agression of the Duchth*, London: TP
- _____, 1971, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, London.TP.
- Ankersmit, F.R., 1987, *Refleksi Tentang Sejarah*, Terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia.
- Davis John, *the Voyages and Work of John Davis: The Navigator*, edisi A.H.Markham, London: Hakluyt Society.
- Crawfurd John, 1820, *History of the Indian Archipelago Containing an Account of the Manners, Atrs, Languages, Raligion, Institutions and Commerce of its Inhabitans 3 Vols*, Edinburg:TP.
- George Graville Putnam, 1922, *Salem Vassel and their Voyages*, The Essex Institute.
- Gottschalk, Louis, 1988, *Mengerti Sejarah, Cetakan Ke-5*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Jackson, Andrew, *Third State of Nation*, Washington DC, 1831-12-06

- _____, *Fourth State of Nation*, Washington DC, 1832-12-04
- James Duncan, Philips, 1847, "Salem and the Indies", *The Story of the Great Commercial Era of the City*, Cambridge.
- Jeremiah N Reynolds, 1835, *Voyage of the United States Frigate Potomac*, New York: Harper and Brothers.
- Kirk Monroe, 1901, *A Son of Satsuma*, New York: Scribners.
- K.F.H. Van Langen, 1888, *Atjeh Westkust, Met Darbij Behoorende Kaart*; Leiden: E.J.Brill.
- Kreemer, J, 1923, *Atjeh, Algeemen Samenvatted Overzicht Land en Volk van en Onderhoorigheden*. E.J.Brill. Leiden.
- Lee Kang Hing, 1995, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*. Kuala Lumpur: Oxford University Press
- M.Nur El Ibrahimy, 1993, *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*, Jakarta: Grasindo.
- Mohammad Iskandar, Nusantara Dalam Kurun Niaga Sebelum Abad ke-19, dalam *Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol.7 Nomor 2, Oktober 2005.
- Owen Rutter., 1930, *The Pirate Wind: Tales of the Sea-Robbers of Malaya*, Hutchinson & Co.Ltd. (issued as Oxford University Press paperback 1986).
- Purwanto, Bambang, 2002, 'Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris: 'Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta: Dipersembahkan Kepada Teuku Ibrahim Alfian, 135-161, Jakarta: Yayasan MSI.
- Reid, Anthony, 1992, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Obor.
- _____, 2005, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other History of Sumatera*, Singapura: Singapore University Press
- Ricklef, M.C., *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2005),
- Said, H. Mohammad Said, Cetakan ke-4 TTT, *Aceh Sepanjang Abad 1*, Medan: Waspada.
- Sahur, Ahmad, 1976, *Merantau bagi Orang Pidie*, Darussalam: Kertas Hasil Penelitian PLPIIS-Aceh.
- Sartono Kartodirdjo, 1997, "Modernisme dalam Perspektif Historis", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. No.5*.

- _____, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia.
- Smith, Holly S, 1997, *Aceh: Art and Culture*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Tarling, Nicholas, 1957, "Sumatra and The Archipelago", dalam *British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871*, JMBRAS.
- Taufik Abdullah (ed), 2005, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Cet.5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- US Marine Corps, 1941, *Cougar Scream*, US 166th Marine Corps: Vol. 1 Nov., 1941. No. XXIII
- Van Langeen, K.F.H.,1888,*Atjeh Westkust Metdaarbij Behoorende Kaart*, Leiden: E.J.Brill.
- _____,1888,"De Intrichting van Het Acehsche Staatsbestuur order Het Sultanaat", dalam *BKI III*.
- _____,1986, *Susunan Pemerintah Aceh Semasa Kesultanan*, Terjemahan Aboe Bakar Banda Aceh: PDIA, Banda Aceh.
- Veltman, TJ., *Nota over de geschiedenis van het Lanschap Pidie*, TBG.,58.
- Vickers.A, 2005, *A History of Modern Indonesia*, London: Cambridge University Press.

Folklore

Raja Dumet dan Putri Barusy, cerita rakyat yang berkembang pada masyarakat Aceh Barat Daya.

Hikayat

Hikajat Potjut Muhammad, edisi G.W.J Drewes, Martinus Nijhoff, *The Hague*, 1979.

Hikayat Ranto karya Leube Isa versi Sahur, *Merantau bagi Orang Pidie*, PPIISB, 1976.

Hikayat Teungku di Meukek versi Teuku Abdullah Sakti dalam *Balee Tambeh*, 2022.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

Jl. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Gp. Mulia, Banda Aceh - 23123
Telp/Fax. 0651-23226 | Email: bpnbaceh@kemdikbud.go.id
Website. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/>